

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini tepatnya di Indonesia perkembangan Akuntansi di pemerintahan semakin pesat terutama tentang menguatnya keharusan terhadap penerapan akuntabilitas pada lembaga sektor publik baik dipusat maupun daerah. Karena sudah banyak instansi maupun lembaga pemerintah yang mewajibkan konsep akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi ke pemerintahannya.

Akuntabilitas dapat disebut sebagai suatu keharusan yang dilakukan untuk bertanggungjawab atas sukses atau tidak tercapainya misi suatu organisasi dalam mencapai visi yang ditentukan sejak awal. Keharusan terhadap pelaksanaan akuntabilitas semakin meningkat khususnya pada akuntabilitas keuangan, sehingga dapat menciptakan sebuah dorongan bagi manajemen pada sektor publik agar dapat memberikan informasi dalam laporan keuangan.

Sebab pada saat ini akuntabilitas keuangan pada pemerintah menjadi pusat perhatian masyarakat dikarenakan adanya praktek korupsi yang kerap terjadi di Indonesia, praktek kecurangan seperti korupsi, penyelewengan dana bisa diminimalisir dengan adanya keakuntabilisan suatu laporan dan perkembangan Akuntansi Sektor Publik. Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dimulai dari perencanaan , pemakaian, serta pelaporan anggaran, sehingga terciptanya akuntabilitas laporan keuangan yang baik.

Menurut Lewerissa (2018), Akuntabilitas keuangan adalah suatu tanggung jawab tentang kejujuran terhadap pendanaan, pengungkapan dan kepatuhan

mengacu kepada hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Target dari pertanggungjawaban ini tertuju pada laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana oleh lembaga pemerintah. Pemerintah diharuskan untuk menyampaikan hasil dari program yang telah dikerjakan agar masyarakat umum bisa memberikan penilaian terhadap pemerintah apakah telah bekerja dengan efisien, efektif atau belum.

Menurut Oktavia (2022), mengemukakan bahwa Akuntabilitas dapat diartikan sebagai keharusan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan implementasi pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah untuk terwujudnya tujuan yang telah ditentukan. Banyaknya kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih berlanjut sampai sekarang telah memberikan dampak semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat terkait akuntabilitas keuangan pemerintah. Agar terwujudnya tuntutan tersebut dibutuhkan dengan adanya kemampuan kolaboratif dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sehingga dapat menghasilkan hasil yang tepat, konsisten serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Permasalahan yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah maraknya penyelewengan dana dan wewenang sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi, di Indonesia korupsi hal yang sangat di benci oleh masyarakat, karena dalam beberapa tahun terakhir kasus korupsi semakin meningkat baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masalah ini menjadi fokus utama yang harus ditangani dan diperbaiki oleh

pemerintah di Indonesia, akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas segala keputusan yang diambil, yang dimana keputusan tidak boleh merugikan pihak manapun, termasuk masyarakat.

Salah satu fenomena yang relevansi terjadi pada pemerintah adalah kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh mantan kepala desa Bongkang Kecamatan Harui, tersangka melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2018. Penyebab yang terjadi yaitu karna ketidakmampuan mensinergikan uang yang diperoleh dengan kebutuhan masyarakat “antara kebutuhan masyarakat dengan program-program yang telah disusun”, Ketidapahaman tersebut terjadi pada kepala desa hingga perangkat desa yang mengelola. Padahal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tabalong, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi setiap tahun serta bimbingan teknis. Di sisi lain Kepala Inspektorat Tabalong, Yuzan Noor melaporkan bahwa hasil pengawasan dari perhitungan kerugian negara terhadap pengelolaan APBDes 2018 adalah sebesar Rp 369.448,500. Ada beberapa bidang yang menyangkut dengan dana tersebut, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa nilai kerugiannya sebesar Rp 25.979.000, kemudian terdapat pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 80.409.500 serta bidang kemasyarakatan sebesar Rp 56.050.000 yang bersumber dari APBD. Selain dari dana yang bersumber dari APBD, terdapat juga dana yang bersumber dari APBN, yaitu bidang pembangunan desa sebesar Rp 207.110.000. (Sumber: kalsel.bpk.go.id).

Dilansir dari *datariau.com* Pada pemerintah Indragiri Hulu, terjadi penyimpangan dana sebesar Rp. 31,385 miliar dari APBD. Penyimpangan ini terjadi dalam kegiatan yang diajukan oleh anggota DPRD tanpa melalui mekanisme musrenbang, dan terdapat total 185 paket pekerjaan. Kejadian ini merugikan keuangan daerah dan negara, serta ditemukan dalam kegiatan yang diajukan oleh dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai sebesar Rp 4.849.000.000.00. Bahkan, dalam penganggaran belanja modal pada DPA dinas PU Inhu tahun anggaran 2015, meskipun tanah di lokasi kegiatan belum tercatat sebagai aset PEMDA, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 950.000.000. (*sumber: www.datariau.com*).

Dari fenomena tersebut membuktikan bahwa pentingnya transparansi, audit sektor publik serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dana oleh pemerintah. Pemerintah harus memberikan kepastian bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah naungan mereka harus menerapkan dan mengimplementasikan *good governance* serta prinsip akuntabilitas keuangan secara baik agar kasus serupa dapat meminimalisirkan di kemudian hari sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi di kalangan pemerintahan.

Adanya keberadaan kecurangan pada sektor publik dan penyelewengan dana di berbagai lembaga pemerintah memerlukan alat untuk mengatur dan pengawasan, salah satunya yaitu sistem audit kinerja. Pentingnya lembaga pemerintah dalam tindakan pencegahan serta pendeteksian tingkat kejahatan keuangan sehingga membutuhkan audit sektor publik yang mendasari sebagaimana yang telah dilaksanakan pada pejabat atau pegawai tersebut

(Richard, 2019). Selain itu, audit sektor publik mampu memastikan bahwa sistem akuntansi yang ada pada pemerintah dapat dikendalikan dan dioperasikan dengan baik, serta seluruh transaksinya dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang keefisienan, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap peraturan serta norma yang berlaku.

Pada dasarnya dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) audit sektor publik diterapkan untuk memeriksa kinerja dan tata kelola keuangan pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kehadiran audit sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas serta diikuti dengan transparansi, yang diketahui mampu memastikan pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan menggunakannya secara tepat, kemudian audit sektor publik juga akan meningkatkan transparansi serta memudahkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan. Transparansi disini diartikan dengan keterbukaan terhadap berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah disertai transparannya dari seputar informasi yang selalu berhubungan dengan merancang serta mengatur dana publik sehingga nantinya masyarakat akan melihat untuk mengetahui sebagaimana dana publik dialokasikan secara tepat sesuai dengan peraturan dan kebijakan serta melakukan pemantauan kinerja pemerintah. Audit sektor publik berfokus pada transaksi dan peristiwa yang terkait dengan pendapatan, kas, perolehan aset, penerimaan, serta pengeluaran. Hal ini berguna untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang relevan dan tepat untuk menentukan apakah informasi atau kondisi tersebut sesuai dengan kriteria yang

telah ditetapkan, pada dasarnya dalam memberikan informasi dan pemeriksaan independen dari kepengurusan serta kinerja kebijakan atau program kepada pihak yang bertanggung jawab atas pemerintahan.

Praktik akuntansi menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan entitas perusahaan karena bertindak sebagai alat pencegah yang kuat terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, pemerintahan yang menerapkan sistem akuntansi yang tepat dan akurat cenderung akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal keuangan daripada yang tidak menerapkan sama sekali. Audit sektor publik yang efektif mampu membantu untuk mengurangi biaya tidak langsung, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kemungkinan kerugian dari aset yang tidak dijaga secara memadai, adanya akuntabilitas yang buruk pada sektor publik memerlukan audit yang tepat dan menyeluruh serta kerja yang efektif terhadap kebijakan, program, dan prosedur pemerintah yang telah ditetapkan sejak awal agar dapat mencapai sistem akuntansi dan pengelolaan dana yang tepat sasaran.

Transparansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting diterapkan karena hal ini termasuk bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, transparansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu mengoptimalkan akuntabilitas dalam mengatur keuangan dan program yang akan dilaksanakan, hal ini dapat menghindari terjadinya praktik penyimpangan atau penyelewengan dana yang akan terjadi, Dengan adanya transparansi, masyarakat

mampu mengetahui informasi tentang program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat dalam pengambilan keputusan, pemerintah akan mampu mengevaluasi kinerjanya dengan benar dan melakukan pemeriksaan pada program yang akan dilaksanakan. Transparansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pandangan masyarakat, dengan hadirnya transparansi masyarakat akan mudah untuk mempercayai pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya prinsip transparansi bertujuan untuk menciptakan keterbukaan pemerintah terkait kebijakan yang dilaksanakan, komunikasi publik dari pemerintah, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat merupakan dua aspek penting dari prinsip transparansi, kedua aspek tersebut menjadi sulit untuk dijalankan apabila pemerintah tidak mampu mengelola kinerjanya secara efektif. Manajemen kinerja yang efisien adalah langkah awal yang diperlukan untuk mencapai tingkat transparansi yang diharapkan. Transparansi dibangun melalui aliran informasi yang bebas, di mana semua tahapan dalam pemerintahan dan lembaga harus dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, serta informasi yang tersedia harus cukup jelas untuk dimengerti dengan mudah.

Akuntabilitas sangat penting untuk kinerja yang efektif di sektor publik karena baik pejabat terpilih ataupun tidak terpilih harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan cara yang terbaik dan menggunakan sumber daya yang disediakan secara efektif dan efisien. Di sektor publik, semua pejabat pemerintah harus bertanggung jawab

kepada warga negara untuk membenarkan sumber dan pemanfaatan sumber daya publik yang mereka miliki. Sangat penting untuk warga negara memiliki akses ke informasi baik fakta ataupun angka yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan, sehingga mampu mendorong partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah dan juga untuk memantau atau mengontrol perilaku pemerintah.

Dalam sektor publik, *good governance* menjadi salah satu hal utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, yang mana dalam menjalankan tanggung jawabnya pemerintah harus mampu memastikan adanya akuntabilitas, dan transparansi di dalamnya. Dengan menerapkan hal tersebut maka pemerintah mampu menciptakan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah secara tepat dan akurat, menerapkan *good governance* memerlukan adanya sebuah pengembangan keterampilan dan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang positif, seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, dan keadilan, merupakan hal penting dalam memastikan bahwa sumber daya negara dikelola dengan efektif oleh pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan masyarakat serta negara. Untuk mendukung *good governance*, penting untuk fungsi pengawasan internal dan eksternal pemerintah beroperasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini akan memastikan efisiensi

dan efektivitas dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, serta membantu audit dalam mencapai program dan tujuan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Akuntabilitas dan transparansi memainkan peran utama dalam reformasi sektor publik, dan secara definitif, kualitas *good governance* dapat diukur melalui kedua prinsip ini, ditambah dengan peran masyarakat dan supremasi hukum.

Beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen dan independen yang sama, memiliki hasil yang berbeda pada beberapa penelitian yang telah ditemukan dan dilakukan. Terdapat penelitian Ebimobowei et al., (2021), mengemukakan bahwa audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Kemudian transparansi dan *good governance* juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Pada penelitian Pramesti (2020), mengemukakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Menurut penelitian Purba & Amrul (2019), menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian Lewerissa (2018), memiliki hasil bahwa *good governance* dan audit kinerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pada dasarnya alasan penelitian ini ditulis adalah variabel yang digunakan tentunya berbeda dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, selain variabel penulis akan melakukan penelitian dengan tahun hingga tempat penelitian

yang berbeda serta pemilihan sampel yang digunakan akan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Kinerja, *Good Governance*, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Salah satu masalah utama pada akuntabilitas keuangan adalah lemahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, pemerintah seringkali tidak mempublikasikan informasi secara terbuka terkait anggaran serta pengeluaran keuangan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik.
2. Adanya penyelewengan dana merupakan masalah utama dalam akuntabilitas keuangan pada pemerintah, pemerintah seringkali memanfaatkan dana publik untuk kepentingan pribadi seperti melakukan tindak korupsi.
3. Ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil menjadi masalah dalam akuntabilitas keuangan, pemerintah dinilai mengalokasikan anggaran yang besar untuk suatu proyek, namun hasil yang dihasilkan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan, hal ini dapat terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengawasan yang baik.

4. Kurangnya pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan pemerintah yang menjadi masalah utama, pemerintah tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dengan bijak dan akurat, sehingga sulit untuk diketahui bagaimana pengeluaran dana publik dilakukan.
5. Lemahnya audit yang dilakukan oleh auditor pada sektor publik yang berakibatkan pemerintah tidak mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku.
6. Adanya hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan, maka penting untuk menarik batasan masalah agar masalah yang diteliti terhindar dari maksud yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini lebih jelas arahnya. Penelitian ini dibatasi pada lingkup masalah Akuntabilitas Keuangan dengan masalah Pengaruh Audit Kinerja, *Good governance*, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang serta masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu?

2. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu?
4. Apakah audit kinerja, *good governance*, transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh audit kinerja, *good governance*, transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya adalah sebagai berikut::

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan serta wawasan baru terkait dengan akuntabilitas keuangan, dan diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa masukan serta informasi yang bermanfaat berkaitan dengan pentingnya penerapan akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Indragiri Hulu.

b. Penulis

Penelitian ini menjadi wadah untuk memberikan pengetahuan baru serta memperluas wawasan dalam memahami audit sektor publik, *good governance*, transparansi terhadap akuntabilitas keuangan.

c. Peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk melanjutkan riset yang sama dengan akuntabilitas keuangan atau menjadi perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan.

d. Universitas

Dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Medan dalam meningkatkan wawasan kepada mahasiswa pada Fakultas Ekonomi khususnya prodi Akuntansi.